



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina

Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, beralamat di Gedung Bina Marga Lantai VI, Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang diwakili oleh Ir. Yudiarmand Zulkarnain Kasim M.Eng.Sc, (Kasubdit Pengadaan Tanah Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jufri, S.T., Tommy Amar Tassa, S.T., Marzuki, S.H., dan Salman, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 56/SKS/BK5/ 2021, tanggal 9 Desember 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho di bawah Register Nomor: W.1.U18/15/HK.02/I/2022, tanggal 26/01/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap;

Mulyadi, Alamat Lr Tgk Ibrahim, Desa Lam Raya, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh, Besar, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth tanggal 27 Januari 2022 tentang Penawaran;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth tanggal 2 Februari 2022;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth tanggal 3 Februari 2022 tentang Hari Sidang;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan konsinyasi/penitipan ganti kerugian uang sejumlah Rp. 58.605.496,- (Lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan luas tanah 381 m², dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 31,

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar untuk keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dikarenakan Termohon sebagai pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian berdasarkan Berita Acara Pihak Yang Berhak Telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir Dan Tidak Memberikan Kuasa, Nomor 1391.12/BA/PPT-TOL/BPN.12/II/2021 tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jantho telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menyatakan saat ini belum dapat menerima nilai ganti rugi yang ditawarkan tersebut sehingga Termohon menolak pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menipiskan uang ganti kerugian tersebut ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Mulyadi (Termohon) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) serta Surat Keterangan Hibah;
2. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah, Nomor : 1424/PPT-TOL/BPN.11/II/2021, tanggal 15 Februari 2021, Hal : penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Jantho atas tanah di Kecamatan Kuta Baro;
3. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, berupa Surat Keterangan Nomor 1391/BA/PPT-TOL/BPN.11/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang perlu dilakukan penitipan ganti kerugian Pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadaan Tanah sebanyak 38 bidang;
4. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, tentang Berita Acara Pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa, Nomor : 1391.12/BA/PPT-TOL/BPN.11/II/2021, tanggal 28 Januari 2021;
5. Fotokopi surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh untuk Pemanggilan Kembali Dalam Rangka Konfirmasi Hasil Musyawarah Bentuk Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Aceh Ruas Sigli — Banda Aceh di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 12 November 2020;

6. Fotokopi Laporan Revisi SIH WIRYADI & REKAN tentang Penilaian Properti Pengadaan Tanah Jalan Tol Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli- Banda Aceh yang terletak di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, tanggal 05 Mei 2020 No. Lap 00066/2.0013-00/PI/11/01091/V/2020 dan Resume Lampiran Opini Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli - Banda Aceh Desa Puuk Kecamatan Kuta Baro Kab. Aceh Besar Nomor 00066/2.0013-00/PI/11/01091/V/2020, tanggal 05 Mei 2020;

7. Fotokopi surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 590/1447/2020, tanggal 12 Oktober 2020, tentang Pembararuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Aceh ruas Sigli-Banda Aceh;

8. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 531/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 1080/KPTS/M/2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

10. Fotokopi bukti setoran penitipan uang Konsinyasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diatur bahwa Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:

- Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;
- Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;
- d. Objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:
 - 1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan;
 - 2) masih dipersengketakan kepemilikannya;
 - 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) menjadi jaminan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bahwa Termohon sebagai Pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti berdasarkan Berita Acara Pihak Yang Berhak Telah Diundang Secara Patut Tidak Hadir Dan Tidak Memberikan Kuasa, Nomor 1391.12/BA/PPT-TOL/BPN.12//2021 tanggal 28 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut beralasan, karena itu dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 58.605.496,- (Lima puluh delapan juta enam ratus lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) terhadap 1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 381 m², dengan Nomor Urut Daftar Nominatif 31, terletak di Desa Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, untuk keperluan pembangunan jalan tol ruas Sigli – Banda Aceh dari Pemohon kepada Termohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jantho untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Termohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Faisal Mahdi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jantho, penetapan tersebut pada hari itu

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.Kons/2022/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Aiyub, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Jantho, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aiyub, S.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Penawaran	Rp. 1.500.000,00
4. Biaya Penggilan	Rp. 200.000,00
5. Materai	Rp. 20.000,00
6. PNPB	Rp. 50.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
8. <u>Leges</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);